

PENULISAN SKRIPSI

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
(Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan
Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks)**



Diajukan oleh:

Frisca Regina Ferreira Lay

NPM : 200513774
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
(Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan
Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks)



Diajukan oleh:

Frisca Regina Ferreira Lay

NPM : 200513774
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 22 Mei 2024

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
(Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan
Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Juni 2024

Tempat : Ruang Pendaratan 1 Lantai 2

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Disparitas Putusan Hakim Dalam Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks)** ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum dengan program kekhususan Sistem Peradilan. Selama proses penyusunan skripsi ini banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi penulis, namun pada akhirnya dapat dilalui oleh penulis berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Para dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Keluarga penulis, Joaquim Ferreira (Bapa), Alita Soares Lay (Mama), dan Julito Jose Luis Lay Ferreira (Kakak), untuk segala doa, semangat, cinta, nasihat, dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
6. Sahabat-sahabat penulis, Fransiskus, Mathew, Rajif, Perpetua, Emanuela, Aprilia, Yohana, Zefanya, Nathania, Aurelia, Kenny, Deny, Lidya, Ciciliananda, Elizabeth, Welhelmina, Enjel, dan Febronita yang sudah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama skripsi.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Penulis



Frisca Regina Ferreira Lay

ABSTRAK

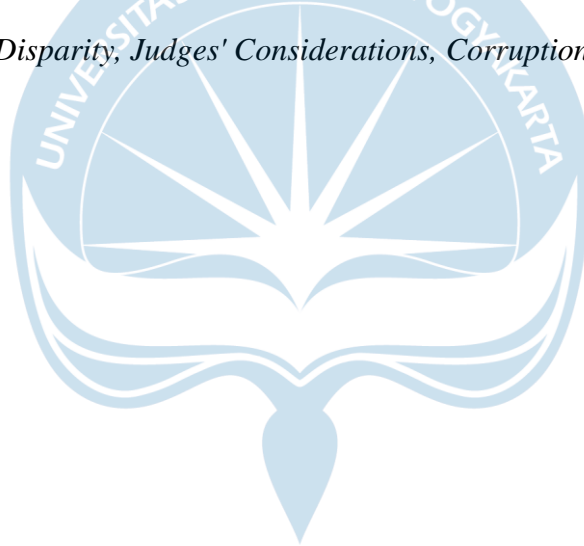
Dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, tidak terdapat pedoman dalam pemberian pidana secara tegas. Hal tersebut terjadi dikarenakan undang-undang hanya mengatur hukuman maksimal dan minimalnya saja. Di dalam praktiknya, masih terdapat disparitas di dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim sehingga menyebabkan terjadinya disparitas ppidanaan di dalam penjatuhan putusan pada pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim sehingga menyebabkan terjadinya disparitas ppidanaan di dalam penjatuhan putusan pada pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara karena adanya perbedaan pandangan hakim dalam mempertimbangkan tingkat kesalahan dari Terdakwa, keadaan atau kondisi yang melingkupi Terdakwa, pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai hal yang meringankan, dan adanya perbedaan besaran nominal kerugian keuangan negara.

Kata kunci: Disparitas, Pertimbangan Hakim, Korupsi, Keuangan Negara

ABSTRACT

In criminal law and regulations in Indonesia, there are no strict guidelines for imposing penalties. This happens because the law only regulates maximum and minimum penalties. In practice, there are still disparities in the decisions of judges who impose sentences in corruption cases. The aim of this research is to analyze the basis of the judge's considerations, which causes disparities in punishment in handing down decisions to perpetrators of criminal acts of corruption that harm state finances. This research uses normative legal research methods. The results of this research are the basis for the judge's consideration, which causes disparities in punishment in handing down decisions on perpetrators of criminal acts of corruption which harm state finances due to differences in the judge's views in considering the level of guilt of the Defendant, the circumstances or conditions surrounding the Defendant, the consideration that the Defendant has repaid the loss. state finances as a mitigating factor, and there are differences in the nominal amount of state financial losses.

Keywords: Disparity, Judges' Considerations, Corruption, State Finances



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pemidanaan	20
1. Pengertian Disparitas Pidana	20
2. Faktor Penyebab Disparitas Pidana	22
3. Kategori Disparitas Pidana	27
4. Upaya Dalam Menangani Disparitas Pidana	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	34
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	34
2. Unsur Tindak Pidana Korupsi	37
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi	39
4. Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara	44
C. Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadinya Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam Dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks	48
1. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam	48
a. Identitas Terdakwa	49
b. Kasus Posisi	49
c. Dakwaan	52
d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	53
e. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju	54
f. Amar Putusan Pengadilan Negeri Mamuju	58
g. Analisis	59
2. Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks	61
a. Identitas Terdakwa	62
b. Kasus Posisi	63
c. Dakwaan	66
d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	67

e. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju	68
f. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar	72
g. Amar Putusan Pengadilan Negeri Mamuju	73
h. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar	74
i. Analisis	75
3. Penyebab Terjadinya Disparitas Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam Dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks	78
BAB III PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Yang menyatakan,



Frisca Regina Ferreira Lay

